

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hoogerwef, *Isi dan Corak-corak Kebijakan*, dalam A. Hoogerwerf (ed), *Overheidsbeleid*, diterjemahkan oleh R.L.L. Tobing (Jakarta: Erlangga, 1983).
- A. M. Fatwa, "Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945", Kompas (Gramedia) Tahun 2009.
- Abdul Gani Abullah, *Catatan Kuliah Politik Hukum* (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 14 April 2010
- Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung,
- Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.
- Ahmad Fadhil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada).
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996).
- Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*, Prosiding dalam Konggres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstutusionalitas Indonesia, PSP UGM, Yogyakarta.
- Artidjo Alkosta, (editor) *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan dalam Identitas Hukum Nasional* (Yogyakarta: FH-UII, 1997).
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Mahkamah Konstitusi (2008).
- Bernard L. Tanya, Op. Cit., hal. 113. Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Carl J. Friedrich, *Man and His Government* (New York: McGraw Hill, 1963).
- Creswell, John W, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. (Yogya: Pustaka Pelajar 2018).
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka

- Utama, 1999.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firmanzah, 2008, Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Deokrasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Handoyo Hestu Cipto, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2003),
- Hanif Nurcholis, 2007 Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo.
- Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2004), Cet. Kedua, 2.
- J.K. Friend, J.M. Power dan C.J.L. Yewlett, Public Planning: The Inter Corporate Dimention (London: Tavistock, 1974).
- James E. Anderson, Publick Policy Making (New York: Praeger Publishers, 1979).
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Gema Keadilan* 7: 1 (Juni 2020).
- M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Mahfud MD, Tolak-tarik antara Hukum dan Politik Sebagai Fakta dalam pengantar buku Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2013.
- Miriam Budiardjo, 2013, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Prima Grafika, Jakarta. Moh. Mahfud., Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta. 2006.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1.
- Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. (Banda Aceh: LKKI 2022).

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan :IKAPI2021).
- Padmo Wahyono, *Indonesia, Negara Berdasarkan atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Cet. Pertama.
- Padmo Wahyono, *Menyelidik Proses terbentuknya Perundang-undangan* (Forum Keadilan: Jakarta: 1991) No. 29, 65
- Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 220-221
- Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.
- Qamar Nurul and Rezah Farah Syah, *Metode Penelitin Hukum Doktrinal Dan Nondoktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Ramlan Subekti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 2008, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi*, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, Kemitraan Jakarta, dalam Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, 2016, *Evealuasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1985) Cet. Pertama 1.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*. (Palur Wetan: Oasa Pustaka 2020).
- Soedarto, dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Edisi, I, Cet. IX.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991).
- Thalib, Abdul Rasyid, and M. Sh. Wewenang *Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Tim Penyusun FH Unsrat, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 1989).

Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017.

Tjahyo Kumolo, Konsep dan Implementasi Hukum Negara Pancasila dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Nasional, Seminar Nasional, 30 September 2017, Gedung Pascasarjana Lantai 6, Semarang.

Skripsi dan Jurnal Ilmiah

Adinda Aulia Pratiwi, "Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada," Unair News, 2024, diakses pada 25 Agustus 2024, <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>.

Dewi Kurniasih, Tatik Rohmawati, "Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Partai Politik (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013)", Jurnal Majalah Ilmiah Unikom, Volume 11, Oktober 2013, Universitas Komputer Indonesia.

Eduardo Edwin Ramda, "Dinamika Pilkada 2024: pengaruh pusat dan pelarian capres yang kalah", The Conversation, Diterbitkan: Juli 12, 2024.

Hasim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024", Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol.1 No. 4, September 2024, Konawe: Fakultas Hukum Universitas Lakidende, hlm. 5374.

Indonesia Judicial Research Society (IIRS). "CATATAN IIRS TERHADAP PEMILIHAN UMUM DAN PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM" Jakarta, 23 Agustus 2024.

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 6 Nomor 1 Tahun 2025.

Muhammad Anwar Soleh, Durohim Amnan. " Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah" Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Volume. 1, No. 3 September 2024.

Siahaan, M. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Skripsi Ilfah Luthfiah, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Fakultas Syariah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi M. Saefudin, Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

Suprantio, S. (2014). Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana. Jurnal Yudisial, 7(1).

Situs Website

- Annisa,A. (2024). Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada 2024. Tersedia secara online dari: <https://fahum.umsu.ac.id/keputusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-2024/>. [Diakses pada 16 Januari 2025]
- CNN Indonesia. (2024). Poin-Poin Putusan MK Soal Syarat Dan Usia Calon Kepala Daerah. Tersedia secara online dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820162912-121135392/poin-poin-putusan-mk-soal-syarat-dan-usia-calon-kepala-daerah>. [Diakses pada 16 Januari 2025]
- Fernando Wiryawan(2024), Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Hak Konstitusional, Tersedia secara online dari <https://cekhukum.com/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024-dan-hak-konstitusional/> [Diakses Pada 17 Januari 2025].
- Gugum ridho putra, ANOTASI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR60/PUU-XXII/2024. Tersedia secara online dari: <https://grplaw.id/2024/08/21/anotasi-dan-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-60-puu-xxii-2024/> [Diakses pada 22 Januari 2025]
- Pemilihan Kepala Daerah: Proses dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat. Tersedia Online dari: <https://podme.id/apa-itu-pemilihan-kepala-daerah/> [Diakses pada 22 Januari 2025].
- Yuniarto,T. (2024). Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Pencalonan Kepala Daerah. Tersedia secara online dari: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah>. [Diakses pada 16 Januari 2025]

Perundang- Undangan

- Pembukaan UUD NKRI 1945 Alenia keempat
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 60/PUU XXII/2024

UINSSC